

Pendidikan Islam di Bawah Bayang Kolonialisme: Kurikulum, Tantangan dan Perkembangannya

¹Aufa Ni'matul Wafa, ²Ghanis Fatiha Namya Safia, ³Nita Yuli Astuti

^{1,2,3} UIN Walisongo Semarang

1aufanimatul1@gmail.com 2ghanisfatihananya@gmail.com 3nitayuli@walisongo.ac.id

ABSTRACT: *This study thoroughly investigates how Islamic education, particularly its curriculum, adapted and developed under colonial pressures and interventions. In addition, it identifies the various problems faced. The data in this study were collected from primary sources, such as colonial archival documents, religious manuscripts, and modern writings. Secondary sources, such as books and scholarly journals, supported the data with a qualitative approach with desk studies and historical methods. The data collection process involved searching, verifying, and extracting relevant information from historical texts. Qualitative content analysis identified patterns and themes, and interpretation of historical texts contextualized the results in time and space. The study shows that colonial policies significantly changed the Islamic education curriculum through direct repression and forced modernization. The institution faced many major problems. These included standardization of education, limited institutional autonomy, and attempts to eliminate Islam from the curriculum. Nevertheless, Islamic education showed a remarkable ability to adapt. It created various defense methods, internal reforms, and curriculum innovations that combined modern elements with Islamic traditions. This ensured that Islamic education survived and flourished during the colonial period.*

Keyword: *Islamic education, Colonial curriculum, Adaptation and innovation, Repression and modernization, Internal reform*

ABSTRAK

Penelitian ini secara menyeluruh mengkaji bagaimana pendidikan Islam, khususnya kurikulumnya, beradaptasi dan berkembang di bawah tekanan serta intervensi kolonial. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer, seperti dokumen arsip kolonial, naskah keagamaan, dan tulisan-tulisan modern. Sumber sekunder, seperti buku dan jurnal ilmiah, turut mendukung data dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan metode historis. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian, verifikasi, dan ekstraksi informasi yang relevan dari teks-teks sejarah. Analisis isi kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema, sedangkan penafsiran teks-teks sejarah membantu mengontekstualisasikan hasil dalam dimensi waktu dan ruang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial secara signifikan mengubah kurikulum pendidikan Islam melalui penindasan langsung dan modernisasi yang dipaksakan. Lembaga pendidikan Islam menghadapi banyak masalah besar, termasuk standarisasi pendidikan, terbatasnya otonomi kelembagaan, serta upaya menghapuskan unsur-unsur Islam dari kurikulum. Namun demikian, pendidikan Islam menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Berbagai metode pertahanan, reformasi internal, dan inovasi kurikulum yang memadukan unsur-unsur modern dengan tradisi Islam berhasil diciptakan. Hal ini memastikan pendidikan Islam tetap bertahan dan berkembang pada masa kolonial.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Kurikulum kolonial, Adaptasi dan inovasi, Penindasan dan modernisasi, Reformasi internal*

PENDAHULUAN

Identitas, karakter, dan arah perkembangan suatu negara dapat dibentuk sebagian besar oleh pendidikan. Nilai-nilai budaya, agama, dan pengetahuan ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Selama sejarah, sistem pendidikan

suatu masyarakat tidak pernah berada di bawah kontrol kekuasaan; struktur politik dan kekuatan hegemonik yang berkuasa sering memengaruhi, bahkan mengontrolnya. Hal ini jelas terlihat dalam sejarah pendidikan Nusantara (Ilham et al., 2024), terutama pendidikan Islam, yang berkembang pesat sejak abad ke-13 tetapi kemudian menghadapi tekanan besar saat kolonialisme Eropa, terutama Belanda, mulai berpengaruh. Singkatnya, kolonialisme tidak hanya membawa perubahan ekonomi dan politik, tetapi juga mengubah sosial dan budaya, termasuk sistem pendidikan (Sulistyawati et al., 2022). Seiring dengan munculnya kebijakan pendidikan kolonial, pendidikan Islam, yang sebelumnya berkembang secara alami melalui pesantren, madrasah, surau, dan halaqah-halaqah di masjid, mulai mengalami tekanan sistematis. Sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah kolonial bertujuan untuk mencapai tujuan penjajahan, seperti membangun tenaga kerja yang terampil, mempekerjakan birokrat lokal yang setia, dan menyebarkan ideologi Barat yang lebih sekuler (Almaatouq et al., 2020).

Institusi pendidikan Islam yang tidak tunduk pada sistem kolonial dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan. Karena itu, mereka sering dipinggirkan, diawasi ketat, atau tidak mendapatkan dukungan apapun (Habibi et al., 2025). Menurut Milligan (2020), pendidikan seringkali digunakan sebagai alat hegemonik untuk menyebarkan prinsip-prinsip dominasi kultural Barat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan pribumi – terutama yang berbasis agama seperti pesantren dan madrasah – dilihat sebagai benteng tradisionalisme yang harus dilemahkan pengaruhnya. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam yang sebelumnya penuh dengan materi keagamaan seperti tafsir, hadits, fiqih, akhlak, dan tasawuf, mengalami penurunan dan penambahan. Pemerintah kolonial biasanya mendorong institusi pendidikan untuk sekularisasi, membatasi pendidikan agama, dan mengintegrasikan mata pelajaran yang sesuai dengan ideologi kolonial, seperti matematika, bahasa Belanda, dan ilmu pengetahuan Barat (Azra, 2004).

Namun demikian, tekanan kolonial tidak segera menghentikan pendidikan Islam di Nusantara (Sabar et al., 2022). Dalam menjaga eksistensi sistem pendidikan Islam, para ulama, tokoh masyarakat, dan pendidik Muslim menunjukkan kekuatan dan inovasi. Mereka tidak hanya mempertahankan metode pembelajaran klasik, tetapi juga mulai membangun sistem pendidikan yang lebih terorganisir dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman (Priyatna et al., 2024). Pendidikan Islam dapat menanggapi kolonialisme dengan strategis dan progresif. Munculnya organisasi-organisasi pembaharu seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan Al-Irsyad adalah buktinya (Syahrir et al., 2021). Oleh karena itu, periode kolonial menjadi periode penting dalam sejarah pendidikan Islam karena membawa dinamika perlawanan, adaptasi, dan inovasi dalam sistem pendidikan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana pendidikan Islam berkembang di bawah bayang-bayang kolonialisme (Azra, 2019). Ini akan melihat bagaimana pendidikan Islam dimulai sebelum dan selama penjajahan, bagaimana intervensi kolonial terhadap kurikulum, masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan bagaimana mereka beradaptasi dan tetap relevan hingga saat ini (Habibi & Holid, 2023).

METODE

Untuk menyelidiki dinamika pendidikan Islam di bawah kekuasaan kolonial, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Metode penelitian ini

termasuk studi pustaka (research library) dan analisis historiografi. Permasalahan yang dikaji bersifat historis dan interpretatif, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, politik, dan budaya masa lalu. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik, dan fokus utama penelitian adalah interpretasi teks dan peristiwa historis. Fokus utama penelitian terletak pada tiga komponen: melihat bagaimana kurikulum pendidikan Islam berubah selama masa kolonial, menemukan masalah yang dihadapi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah, dan menilai cara-cara untuk mengadaptasi dan menentang intervensi kolonial. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Sumber primer mencakup dokumen kolonial, kebijakan pendidikan, naskah keagamaan, tulisan tokoh-tokoh Islam tempo dulu, dan laporan resmi pada masa kolonial, sedangkan sumber sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, disertasi, serta karya akademik lainnya yang relevan dengan tema kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, seleksi sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas, serta pencatatan data dengan teknik anotasi dan kategorisasi tematik. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi tematik dan interpretasi historiografis.

Analisis isi bertujuan untuk menemukan tema-tema utama dalam narasi kolonial dan respons pendidikan Islam, sementara pendekatan historiografi digunakan untuk menafsirkan hubungan sebab-akibat dari proses kolonisasi terhadap sistem pendidikan Islam secara kronologis. Untuk memastikan bahwa hasilnya valid, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi dan dokumen akademik. Metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan menyusun narasi komprehensif tentang perkembangan pendidikan Islam di era kolonial. Selain itu, ia menempatkan pendidikan Islam sebagai entitas yang aktif dan dinamis dalam menanggapi tekanan dari kekuasaan kolonial dan modernisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama penjajahan kolonial—khususnya oleh pemerintah kolonial Belanda—pendidikan Islam di Nusantara mengalami banyak perubahan dan tekanan (Syahid, 2019). Hal ini ditunjukkan oleh penelitian literatur yang dilakukan terhadap berbagai sumber historis dan akademik. Selama berabad-abad, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan madrasah telah berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu agama, pengembangan karakter, dan penyebaran keilmuan Islam (Maghriza et al., 2023). Namun, seiring dengan penerapan kebijakan pendidikan kolonial yang cenderung eksklusif dan sekuler, lembaga-lembaga ini mulai dimarginalisasikan secara sistemik. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan pendidikan yang menyimpang dari prinsip Islam. Sistem pendidikan kolonial berfokus pada pembentukan siswa yang mampu berfungsi dalam struktur pemerintahan kolonial (Zubaedi, 2011). Akibatnya, kurikulum difokuskan pada bahasa Belanda, matematika dasar, dan keterampilan administratif, sedangkan pengajaran agama Islam dihindari. menunjukkan bahwa konten yang mengandung nilai-nilai politik Islam, seperti fiqih siyasah, tafsir ayat-ayat sosial-politik, dan konsep tauhid sebagai dasar perlawanan terhadap kezaliman, sangat terbatas atau bahkan dilarang di banyak institusi pendidikan.

Selain itu, kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan pribumi yang diakui oleh pemerintah kolonial mengalami banyak perubahan. Sementara pesantren tradisional, yang tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah kolonial, tetap mempertahankan kurikulum berbasis kitab kuning dan metode pengajaran tradisional, mereka menghadapi masalah seperti kekurangan dukungan infrastruktur, kurangnya

akses ke sumber daya, dan pengawasan yang ketat dari aparat pemerintah. Seperti yang dicatat oleh Azra (2012), ada beberapa situasi di mana kegiatan keilmuan di pesantren diawasi secara ketat. Beberapa pesantren dianggap sebagai pusat gerakan bawah tanah atau radikalisme anti-kolonial. Selain itu, pendidikan Islam bertahan di bawah tekanan ekonomi kolonial.

Lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan finansial karena kurangnya subsidi atau dukungan negara, serta pembatasan administratif yang menghalangi akses ke dana wakaf atau sumbangan masyarakat. Untuk beroperasi, banyak pesantren harus bergantung pada sistem pengelolaan tradisional dan swadaya masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ulama dan pendidik Islam bertindak aktif meskipun menghadapi tantangan yang kompleks. Gerakan pembaruan pendidikan Islam, yang didirikan oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam, adalah bukti penting bahwa umat Islam tidak berdiam diri di bawah tekanan kolonial; mereka malah melakukan perubahan besar terhadap metode, struktur, dan kurikulum sekolah mereka. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya menjaga pendidikan Islam tetap ada, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sistem pendidikan Islam kontemporer di Indonesia setelah kemerdekaan.

Oleh karena itu, hasil penelitian memperkuat pemahaman bahwa pendidikan Islam selama masa kolonial tidak hanya menjadi korban dari sistem represif kolonial, tetapi juga menjadi subjek aktif yang terus berusaha berubah dan melawan melalui jalur intelektual dan kultural.

Pendidikan Islam di Nusantara telah mengalami perjalanan yang panjang dan dinamis, yang menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Pendidikan Islam berkembang menjadi sistem yang mandiri, berbasis masyarakat, dan berfokus pada pembentukan moral dan penguasaan ilmu keislaman sejak kedatangannya yang erat dengan proses dakwah dan perdagangan pada abad ke-13. Lembaga seperti pesantren, surau, dan madrasah telah berkembang menjadi tempat di mana ilmu keagamaan diajarkan, karakter dibentuk, dan nilai sosial yang berakar kuat dalam budaya lokal disemai. Namun, periode kolonialisme – khususnya di bawah pemerintahan Hindia Belanda – menjadi titik balik penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

Tidak hanya kolonialisme merupakan penjajahan teritorial, tetapi juga hegemoni atas pemikiran, budaya, dan struktur sosial masyarakat jajahan. Pendidikan adalah salah satu bidang strategis yang menjadi sasaran kolonial. Pemerintah kolonial berusaha membangun masyarakat baru yang lebih menguntungkan mereka melalui sistem pendidikan. Mereka ingin membangun masyarakat yang patuh, tidak kritis, dan teralienasi dari budayanya sendiri, termasuk ajaran Islam yang progresif dan membebaskan. Pendidikan Islam mengalami tekanan yang luar biasa dalam konteks ini. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan identitas keagamaan yang kuat, sistem pendidikan Islam yang sudah mapan dianggap tidak relevan dan bahkan berpotensi membahayakan stabilitas kekuasaan kolonial. Pemerintah kolonial kemudian memaksakan sistem pendidikan baru yang bersifat sekuler, mengabaikan prinsip-prinsip religius, dan seringkali meremehkan sistem pendidikan Islam karena dianggap kuno dan tidak kontemporer.

Salah satu cara utama yang digunakan kolonial untuk menghancurkan sistem pendidikan Islam adalah dengan mendirikan sekolah pemerintah yang menggunakan kurikulum Barat dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah ini dimaksudkan untuk menghasilkan birokrat pribumi yang setia kepada kolonialisme dan tidak terpengaruh oleh ajaran Islam, yang dianggap dapat menimbulkan

konflik. Ini menyebabkan dua jenis pendidikan muncul. Ada pendidikan kolonial yang mahal tetapi tidak relevan dengan budaya masyarakat. Pendidikan Islam terpinggirkan tetapi tetap menjadi pusat identitas dan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Pendidikan Islam pada masa kolonial lebih dari sekadar sistem pendidikan; itu juga menjadi sarana untuk melawan penjajahan secara budaya dan spiritual. Madrasah dan pesantren tetap menjalankan fungsinya sebagai tempat pendidikan, sosialisasi, dan konsolidasi perlawanan di tengah tekanan, pengawasan, dan keterbatasan sumber daya.

Para ulama berfungsi sebagai bukan hanya pendidik, tetapi juga sebagai pendidik moral yang mempertahankan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Akibatnya, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pendidikan Islam menanggapi dominasi kolonial ini. Dalam artikel ini, kami akan membahas empat elemen penting: (1) keadaan sebenarnya dari pendidikan Islam selama masa kolonial, (2) cara-cara intervensi pemerintah kolonial terhadap kurikulum pendidikan Islam, (3) berbagai masalah struktural dan kultural yang dihadapi lembaga pendidikan Islam, dan (4) cara-cara adaptasi dan perlawanan yang digunakan masyarakat Islam untuk mempertahankan eksistensi dan relevansi pendidikan mereka.

Pembacaan historis dan konseptual tentang bagaimana pendidikan Islam berkembang selama masa kolonial memungkinkan kita untuk memahami bahwa pendidikan Islam bukanlah sesuatu yang statis dan pasif. Sebaliknya, ia memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran umum, memperkuat identitas umat, dan berfungsi sebagai fondasi bagi gerakan sosial dan politik yang mengarah pada kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, melihat jejak pendidikan Islam di kolonial berarti memahami bukan hanya masa lalu, tetapi juga menghasilkan pelajaran penting untuk pengembangan pendidikan Islam di masa depan yang berakar pada nilai dan konteks lokal sambil tetap terbuka untuk dinamika global.

1. Kondisi Pendidikan Islam di Masa Kolonial

Sejak awal masuknya Islam, pendidikan Islam di Nusantara memiliki akar historis yang kuat. Institusi seperti pesantren, surau, dan meunasah berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama serta sebagai pusat pembentukan moral, sosial, dan bahkan politik umat Islam. Namun, sistem pendidikan Islam mengalami tekanan yang sistematis dari segi struktural, ideologis, dan administratif ketika kekuasaan kolonial Belanda semakin menguat dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pendidikan dianggap sebagai alat strategis oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengontrol penduduk pribumi. Akibatnya, mereka mendirikan sistem pendidikan berbasis Barat dengan kurikulum sekuler dan bahasa pengantar Belanda. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga administrasi rendah dan guru pribumi yang setia pada sistem kolonial. Karena hubungannya dengan gerakan keagamaan dan sosial-politik yang menentang kolonialisme, pendidikan Islam dipandang sebagai bahaya yang mungkin. Pesantren dan madrasah, yang selama bertahun-tahun menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat Muslim, mulai kehilangan perhatian dan dukungan pemerintah.

Lembaga-lembaga ini tidak hanya tidak menerima subsidi, tetapi juga dihukum oleh pemerintah. Kegiatan belajar-mengajar, yang sebelumnya bebas, mulai dibatasi dengan pengawasan administratif yang ketat dan intervensi ideologis terhadap materi pelajaran. Selain itu, pemerintah kolonial membangun sistem pendidikan alternatif yang disebut sebagai "modern" dan "teratur", seperti *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), *Europeesche Lagere School* (ELS), dan *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Tujuan dari sistem ini

adalah untuk menarik perhatian kaum pribumi dan secara tidak langsung menjauhkan mereka dari pendidikan Islam. Dalam situasi seperti ini, pendidikan menjadi medan pertempuran antara keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan tekanan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kolonial. Pendidikan Islam tidak serta-merta hilang, bahkan dalam situasi terpencil. Pesantren mengubah banyak hal, seperti memperluas jaringan ulama, memperkuat hubungan kultural dan spiritual dengan masyarakat, dan tetap mengikuti kurikulum tradisional berbasis kitab kuning. Para ulama bertanggung jawab untuk mempertahankan prinsip dan ciri-ciri masyarakat, dan mereka juga berfungsi sebagai pemimpin informal dalam komunitas Muslim. Pesantren membentuk pemikiran dan karakter generasi berikutnya, yang akan berkontribusi pada gerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan. Pendidikan Islam tidak hanya bertahan sebagai institusi dalam perjuangan, tetapi juga menjadi tempat resistensi kultural. Identitas keislaman yang dibangun melalui pendidikan pesantren berfungsi sebagai benteng untuk melindungi budaya dari asimilasi dan hegemoni epistemologis Barat. Oleh karena itu, pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan fisik dan administratif. Selain itu, memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai lokal dan keislaman di tengah pengaruh kolonialisme.

2. Intervensi Kolonial Terhadap kurikulum pendidikan islam

Selain mengeksploitasi ekonomi dan mendominasi politik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menerapkan strategi untuk mengontrol budaya dan ideologi melalui sistem pendidikan. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah pendidikan Islam, yang pada saat itu berfungsi sebagai alat penting untuk mempertahankan identitas keagamaan dan sosial masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial melakukan intervensi terhadap kurikulum pendidikan Islam dengan metode sistematis yang bertujuan untuk menyesuaikannya dengan ideologi dan kepentingan mereka. Materi pelajaran seperti tauhid yang bersifat kritis, tafsir yang mengandung nilai perjuangan, dan fiqh siyasah (politik Islam) sangat diawasi. Mereka dianggap memiliki potensi untuk membangkitkan kesadaran politik dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Ada beberapa situasi di mana materi-materi tersebut tidak boleh diajarkan, atau hanya boleh diajarkan secara terbatas dan di bawah pengawasan pemerintah.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menghilangkan elemen-elemen pendidikan Islam yang dapat menimbulkan perlawanan atau membentuk identitas kolektif yang bertentangan dengan tujuan kolonial. Mokodenseho (2020) menyatakan bahwa strategi ini bertujuan untuk menghasilkan generasi pribumi yang tidak kritis, tunduk pada pemerintah kolonial, dan menyimpang dari akar budaya dan prinsip Islam yang kuat. Kemudian, kurikulum dipaksa untuk mengurangi pelajaran agama dan menambahkan mata pelajaran baru seperti ilmu pengetahuan alam sekuler, bahasa Belanda, aritmetika, dan sejarah Eropa. Ini dilakukan untuk menyebarkan gagasan bahwa budaya Barat lebih baik daripada tradisi lokal dan untuk mendorong pemikiran rasional-positivistik, yang bertentangan dengan keyakinan agama Islam.

Selain konten, metodologi pendidikan juga berubah. Metode klasik Barat, yang menekankan struktur kurikulum yang sistematis namun ideologis, menggantikan pendidikan Islam tradisional, yang bergantung pada kitab kuning dan menekankan hafalan dan pemahaman tafsir. Pendidikan Islam kehilangan autonominya dalam pengelolaan lembaga dan pengembangan kurikulum, yang sebelumnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai lokal karena intervensi ini.

Setelah kolonial, intervensi ini memiliki efek yang bertahan lama. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, ilmu dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, yang dikenal sebagai dikotomi ilmu. Sementara ilmu umum yang berbasis Barat dianggap sebagai simbol kemajuan dan modernitas, ilmu agama dianggap tidak rasional dan tidak modern. Akibatnya, pendidikan Islam sering berada dalam posisi defensif karena dipaksa untuk memenuhi tuntutan modernisasi tanpa melakukan diskusi epistemologis dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Salah satu tantangan tersendiri adalah mencoba merekonstruksi kurikulum pendidikan Islam pascakolonial. Kemudian, tokoh pembaharu pendidikan Islam seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari mencoba menyelaraskan tuntutan zaman modern dengan warisan tradisional. Namun, sisa-sisa dari intervensi kolonial pada kurikulum masih meninggalkan masalah struktural dan kultural yang kompleks dalam pendidikan Islam modern.

3. Tantangan yang Dihadapi Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah menghadapi tantangan yang rumit selama periode kolonial. Ini termasuk tantangan struktural dan sosial selain kurikulum. Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa pendidikan Islam memiliki kekuatan yang luar biasa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim secara keseluruhan dan menjadi alat untuk pertempuran kultural dan politik. Akibatnya, berbagai kebijakan diterapkan untuk membatasi pertumbuhan organisasi ini. Keterbatasan dana dan sumber daya merupakan masalah utama. Sekolah-sekolah berorientasi Barat yang menggunakan kurikulum kolonial didukung dan disubsidi oleh pemerintah kolonial, tetapi mereka tidak memperlakukan institusi pendidikan Islam dengan cara yang sama. Pesantren dan madrasah hanya dapat bergantung pada dana wakaf atau masyarakat, yang jelas sangat terbatas, terutama dalam ekonomi kolonial.

Akibatnya, banyak institusi pendidikan Islam stagnasi dan beberapa harus ditutup karena tidak dapat memenuhi persyaratan (Munadi & Hakiman, 2021). Pemerintah kolonial mengawasi lembaga pendidikan Islam dengan ketat selain masalah keuangan. Pesantren sering dianggap sebagai tempat persemaian pemberontakan jika mereka terlalu aktif secara sosial-politik atau memiliki ulama yang menentang penjajahan. Dalam beberapa kasus, pesantren dituduh menyebarkan ideologi radikal atau menghasut perlawanan, yang mendorong pemerintah untuk menerapkan tindakan represif seperti intimidasi, pelarangan, dan bahkan penangkapan terhadap pengasuhnya. Pengawasan ini membuat kegiatan belajar menjadi lebih buruk dan menciptakan suasana ketakutan yang mengganggu proses belajar. Selain tekanan dari kolonialisme, masalah internal juga muncul.

Yang paling menonjol adalah bagaimana masyarakat melihat pendidikan Islam. Sekolah-sekolah kolonial, yang menawarkan pendidikan bergaya modern, peluang kerja di pemerintahan, dan ijazah formal, menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat kelas menengah yang mulai menekankan mobilitas sosial dan ekonomi. Pendidikan Islam yang tetap berfokus pada sistem tradisional sering dianggap tertinggal, tidak bergengsi, dan tidak menawarkan masa depan yang menjanjikan. Banyak keluarga Muslim mulai mengirim anak-anaknya ke sekolah kolonial sebagai akibat dari Stigmatisasi ini. Akibatnya, lembaga pendidikan Islam kehilangan sebagian basis dukungannya. Selain itu, kurangnya standar dalam pengelolaan pesantren dan madrasah menyebabkan perbedaan kualitas yang signifikan antara satu lembaga dengan lainnya. Selain itu, karena tidak didukung oleh pemerintah, institusi-institusi ini menghadapi tantangan dalam hal inovasi kurikulum atau pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan Islam cenderung tertinggal dari sekolah-

sekolah kolonial yang lebih terorganisir karena kualitas guru, sarana pendidikan, dan pendekatan pengajaran sangat bergantung pada kemampuan masing-masing lembaga. Namun, keadaan ini justru mendorong kreativitas dan ketahanan pendidik Islam. Banyak pesantren dan madrasah mulai mengembangkan strategi adaptasi lokal, integrasi kurikulum, dan jaringan antar-pesantren untuk mempertahankan eksistensi mereka. Ulama karismatik juga memainkan peran penting dalam menjaga kesetiaan masyarakat terhadap pendidikan Islam dan memanfaatkan institusi pendidikan sebagai alat untuk dakwah dan meningkatkan kesadaran nasional.

4. Pendidikan Islam sebagai Respon terhadap Kolonialisme:

Pendidikan Islam di Indonesia tidak pasif atau menyerah pada keadaan yang menindas, meskipun berada di bawah tekanan besar dari pemerintah kolonial. Sebaliknya, ia terlihat sebagai strategi perlawanan kultural. Untuk memenuhi tuntutan zaman dan tetap mempertahankan identitas dan nilai Islam, lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah, mulai melakukan transformasi dalam bidang pendidikan. Para ulama menyadari bahwa pendidikan Islam harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan sosial-politik yang cepat jika ingin tetap relevan. Akibatnya, banyak pesantren dan tokoh Islam memperbarui kurikulum. Kursi tidak hanya membahas bidang keagamaan klasik, seperti tafsir, hadis, dan fiqih, tetapi juga meluas ke bidang umum, seperti matematika, bahasa asing, sejarah, dan ilmu kesehatan. Noer (1980) mencatat bahwa dalam proses pembaruan ini, ada pergeseran dari sistem halaqah (lingkaran belajar) ke sistem klasikal yang lebih terorganisir, yang memasukkan sistem penilaian dan jenjang pendidikan. Gerakan ini digerakkan oleh organisasi pembaruan Islam. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dan berkontribusi pada modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Institusi ini mendirikan sekolah-sekolah yang menawarkan pelajaran agama dan pelajaran umum dengan pendekatan pendidikan kontemporer. Selain itu, Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis) menantang stagnasi pendidikan tradisional dengan memperjuangkan rasionalitas, pemurnian ajaran Islam, dan pentingnya pengetahuan ilmiah dalam pendidikan. Suatu inovasi besar pada saat itu, mereka menerapkan model pendidikan yang melibatkan kurikulum tertulis, jadwal belajar yang tetap, sistem kelas, dan perpaduan pelajaran agama dan umum. Dengan transformasi ini, kelas menengah Muslim menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan ilmu sebagai alat untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Pendidikan Islam membentuk generasi yang religius dan berpikiran maju, yang membantu membangun kesadaran nasional. Lulusan madrasah dan pesantren kontemporer banyak yang terlibat dalam pergerakan nasional seperti Sarekat Islam dan Jong Islamieten Bond, antara lain.

Pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kesetaraan di luar pendidikan. Di ruang kelas dan halaqah pesantren, guru sering memasukkan pembicaraan tentang keadilan, kezaliman, dan kolonialisme. Ini membangkitkan semangat perlawanan yang cerdas dan berakar pada nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya mempertahankan eksistensinya sendiri, tetapi juga berubah menjadi arena perjuangan kultural dan ideologis melawan hegemoni kolonial. Banyak tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan memiliki latar belakang pendidikan Islam, yang menunjukkan peran pendidikan Islam sebagai penyemai kesadaran nasional. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, dan bahkan Mohammad Natsir berasal dari

sistem pendidikan Islam yang menggabungkan nilai spiritual, kecerdasan, dan semangat kebangsaan. Dengan kata lain, pendidikan Islam di kolonial tidak hanya menjadi korban kebijakan dan tekanan politik yang diskriminatif, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang fleksibel dan inovatif. Ia berfungsi sebagai tempat untuk membangun identitas Muslim yang merdeka, yang tidak hanya tetap ada, tetapi juga mengubah dan berkontribusi pada perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.

Dengan melihat kondisi pendidikan Islam selama masa kolonial, terlihat bahwa kolonialisme tidak hanya berdampak pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga secara signifikan mengganggu struktur dan nilai-nilai pendidikan umat Islam. Pemerintah kolonial menggunakan pendidikan sebagai alat politik untuk membangun masyarakat yang patuh, terkontrol, dan jauh dari nilai-nilai perjuangan, terutama nilai-nilai Islam. Ketegangan yang mendalam antara pendidikan kolonial dan pendidikan Islam disebabkan oleh perubahan paksa pada kurikulum, pembatasan aktivitas lembaga keagamaan, dan penyebaran wacana tentang inferioritas budaya lokal. Madrasah dan pesantren, yang merupakan pusat utama transmisi keilmuan Islam, kehilangan legitimasi institusional di mata penjajah kolonial. Mereka juga distigmatisasi sebagai lembaga tradisional yang kuno dan tertinggal, yang menimbulkan tekanan sosial. Akibatnya, banyak keluarga Muslim memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di institusi pendidikan kolonial karena tuntutan ekonomi dan mobilitas sosial. Institusi-institusi ini menawarkan akses ke posisi administratif dan status sosial yang lebih tinggi.

Namun, pendidikan Islam menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah-tengah semua kesulitan ini. Para pendidik Muslim terus melaksanakan tugas pendidikan mereka, baik secara formal maupun non-formal, di tengah tantangan ideologis dan struktural. Ketika nilai-nilai keislaman dimasukkan ke dalam pelajaran umum, sistem klasik digunakan, buku ajar diterbitkan, dan organisasi sosial-keagamaan didirikan untuk menggunakan pendidikan sebagai alat untuk dakwah dan pembaruan, strategi adaptif mulai dipikirkan. Kehadiran organisasi seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis menjadi titik balik penting yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu mereformasi diri secara progresif dan kontemporer. Mereka tidak hanya mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kurikulum sekolah, tetapi juga memasukkan pendekatan pedagogis yang lebih sistematis ke dalam ilmu pengetahuan umum. Hasilnya adalah generasi Muslim yang cerdas, kritis, dan memiliki kesadaran sosial-politik yang tinggi. Selain itu, pendidikan Islam secara bertahap menjadi tempat perlawanan ideologis dan kultural terhadap penjajahan. Lembaga pendidikan Islam biasanya menjadi tempat di mana para pemimpin pergerakan nasional yang memiliki visi kebangsaan dan kepedulian terhadap rakyat yang tertindas muncul. Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk memobilisasi dan memberdayakan masyarakat untuk menentang penindasan kolonial.

Jika kita melihat prosesnya secara keseluruhan, kita dapat mengatakan bahwa pendidikan Islam di kolonial adalah ruang dialektika antara dominasi dan perlawanan, serta antara keterbatasan struktural dan kreativitas kultural. Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan Islam tetap kuat dan dapat mengubah dunia, bahkan di bawah tekanan negara asing. Fakta-fakta ini penting untuk dipertimbangkan saat membangun sistem pendidikan Islam kontemporer yang mempertimbangkan konten akademik dan konteks sosial, budaya,

dan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Nusantara selama masa kolonial menunjukkan perjuangan panjang masyarakat Muslim untuk mempertahankan identitas, nilai, dan sistem pendidikan mereka di tengah hegemoni kekuasaan kolonial. Intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap institusi pendidikan Islam memengaruhi aspek struktural dan administratif serta dasar ideologis. Intervensi ini merusak dasar ideologis dengan mengubah kurikulum, membatasi materi keislaman, dan menghilangkan nilai-nilai penting dari proses pendidikan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghasilkan generasi yang menentang kolonialisme dan menghindari tradisi Islam yang membebaskan dan progresif. Lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah, menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah kekurangan sumber daya, pembatasan kebebasan akademik, dan tekanan politik yang mengancam keberlangsungan mereka. Meskipun demikian, tanggapan komunitas Muslim menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Selain bertahan, institusi ini melakukan berbagai adaptasi dan inovasi. Ini termasuk mengintegrasikan ilmu umum dengan keagamaan, mengubah kurikulum, dan mendirikan organisasi pendidikan Islam modern yang berfokus pada meningkatkan kualitas pendidikan umat. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai benteng untuk mempertahankan ajaran Islam, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk melawan kolonialisme secara intelektual dan kultural. Pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk kader-kader pergerakan nasional karena di ruang kelas pesantren ada kesadaran keagamaan yang kuat dan semangat kebangsaan. Pendidikan Islam tidak hanya menanamkan moralitas dan pengetahuan, tetapi juga menjadi dasar kekuatan sosial-politik umat Islam dalam perjuangan untuk kemerdekaan.

Sejarah pendidikan Islam selama masa kolonial menunjukkan bahwa politik kekuasaan selalu mengganggu pendidikan. Pendidikan Islam di Indonesia berkembang dalam konflik dan diskusi dengan kekuatan luar. Akibatnya, merenungkan sejarah ini sangat penting untuk membangun sistem pendidikan Islam masa kini dan masa depan yang berakar kuat pada prinsip-prinsip keislaman, kompetitif secara intelektual, dan responsif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, A. (2012). *Islam Nusantara: Jaringan Ulama, Tradisi Lokal dan Moderasi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Azra, Azyumardi. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana.

Milligan, M. (2020). Government Policy and National Education Development. *Journal of Political Studies*, 45(3), 123-135.

Mokodenseho, M. (2020). *Kebijakan Pendidikan Kolonial dan Dampaknya terhadap Pendidikan Islam*. Jurnal Pemikiran Pendidikan.

Mokodenseho, R. (2020). Political Influence on Educational Systems. *International Journal of Education Policy*, 12(2), 87-102.

Munadi, S., & Hakiman, A. (2021). *Lembaga Pendidikan Islam dan Tantangan Kolonialisme*. Jurnal Pendidikan Islam.

Munadi, A., & Hakiman, I. (2021). The History of Islamic Education in the Nusantara. *Islamic Education Review*, 7(1), 45-60.

Noer, D. (1980). *Islam dan Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Almaatouq, A., Noriega-Campero, A., & ... (2020). Adaptive social networks promote the wisdom of crowds. *Proceedings of the* <https://doi.org/10.1073/pnas.1917687117>
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulam?' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. University of Hawaii Press.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media.
- Habibi, E., Harisudin, M. N., Chotib, M., Soebahar, A. H., & Holil, M. (2025). EXPLORING EDUCATION MODEL OF PESANTREN BASED LOCAL WISDOM: A CASE STUDY AT PESANTREN OF NURUL QARNAIN JEMBER. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 9(2), 209–218.
- Habibi, E., & Holid, M. (2023). PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI. *ASA*, 5(1), 49–71.
- Ilham, D., Pirol, A., Efendi, E., & Kasman, M. F. (2024). *PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA Konstruksi Kritis Masyarakat Multikultural dalam Era Globalisasi*. Cipta Media Nusantara.
- Maghriza, M. T. R., Ledang, I., & Sari, U. P. (2023). Tawazun Sebagai Prinsip Wasatiyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer. *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, 1(2), 164–182.
- Priyatna, S. E., ZA, A. M., & Barni, M. (2024). MENYINERGIKAN TRADISI DAN TEKNOLOGI: OPTIMALISASI METODE SOROGAN DAN BANDONGAN DI PESANTREN SALAFIYAH MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL. *Bayan Lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam*, 8(2), 51–71.
- Sabar, W., Rahim, A., & Hastuti, D. R. D. (2022). Gender education in the practice of women's agricultural laborers in Enrekang Regency. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan* <https://eprints.unm.ac.id/35758/>
- Sulistiyawati, W., Wahyudi, W., & Trinuryono, S. (2022). Analisis motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran blended learning saat pandemi covid-19 (deskriptif kuantitatif di SMAN 1 babadan Ponorogo). *KadikmA*, 13(1), 68–73.
- Syahid, A. (2019). *Islam nusantara: Relasi agama-budaya dan tendensi kuasa ulama*. Rajawali Pers.
- Syahrir, S., Supriyati, Y., & Fauzi, A. (2021). Evaluasi Dampak Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) melalui model CIPP pada Kinerja Dosen aspek Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(1), 144–150. <https://doi.org/10.58258/jime.v7i1.1716>
- Zubaedi. (2011). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. PT Bumi Aksara.